DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



EDISI JUM'AT. 09 OKTOBER 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI

Pemerintah Belum Tetapkan Pos APBN Subsidi Haji Rp 3,2 Juta

Kemenhaj Bahas Sumber Anggaran dengan Kemenkeu



JAKARTA – Pemerintah dan DPR menyepakati subsidi biaya haji 2027 sebesar Rp 3,2 juta per jemaah. Subsidi tersebut bersumber dari APBN, tetapi pemerintah belum menentukan kementerian yang akan menanggung anggarannya.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha mengatakan, besaran subsidi telah disepakati dalam rapat bersama DPR pada Rabu (7/10). Namun, pos anggaran yang digunakan masih perlu dibahas lebih lanjut. "Asalnya dari APBN. Tapi belum diputuskan APBN dari kementerian mana yang dipakai. Termasuk apakah dari Kemenhaj," jelasnya kemarin (8/10).

> Asalnya dari APBN. Tapi belum diputuskan APBN dari kementerian mana yang dipakai. Termasuk apakah dari Kemenhaj."
>
> **Ichsan Marsha**
> *Juru Bicara Kemenhaj*

Kemenhaj akan membahas sumber anggaran tersebut bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan lembaga terkait. Kepastian pos anggaran diperlukan sebelum subsidi tersebut direalisasikan dalam penyelenggaraan haji 2027.

Dengan subsidi Rp 3,2 juta per jemaah, rata-rata pelunasan biaya haji tahun depan menjadi sekitar Rp 23 juta. Nilai tersebut lebih rendah Rp 3,4 juta dibandingkan pelunasan pada 2026.

Respons MUI

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menuturkan, subsidi biaya haji selama ini berasal dari NM BPKH. Namun, pemerintah kini memberikan subsidi langsung melalui APBN.

Menurut Niam, subsidi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan istitaah atau kemampuan finansial dalam berhaji. Kemampuan finansial, kata dia, dapat berasal dari pihak lain, termasuk bantuan negara.

"Kehadiran negara dalam memfasilitasi warga banyak bentuknya. Kali ini lewat subsidi bidang keagamaan," ucapnya. **(wan/aph)**



PELAYANAN: Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melihat langsung servis gratis sepeda motor di SMK Islam Krembung, Sidoarjo, Kamis (8/10).

Khofifah Tinjau Langsung Servis Gratis 8.100 Motor oleh Siswa SMK di Krembung

KREMBUNG-Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung ketrampilan siswa SMK saat memberikan layanan servis sepeda motor gratis kepada masyarakat di SMK Islam Krembung, Sidoarjo, Kamis (8/10). Program tersebut digelar serentak di 350 titik yang tersebar di 38 kabupaten/kota dengan target 8.100 sepeda motor.

Khofifah melihat langsung para siswa jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM) menangani kendaraan masyarakat. Layanan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-81 Provinsi Jatim yang puncaknya diperingati pada 12 Oktober.

"Hari ini rangkaiannya antara lain memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten atau kota, di 350 titik, total 8.100 (motor)," kata Khofifah.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda peringatan Hari Jadi Jatim. Layanan servis gratis menjadi momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa siswa SMK memiliki keterampilan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja.

Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh SMK yang terlibat dalam program tersebut. Salah satunya SMK Islam Krembung yang ikut membuka layanan servis gratis bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan, layanan yang diberikan siswa meliputi servis ringan dan tune up. Sejumlah SMK peserta bahkan memberikan fasilitas tambahan berupa oli gratis hingga cuci motor. "Jadi, kita melaksanakan servis gratis.

● Ke Halaman 10

POLSEK TAMAN

ASN Bakal Biayai BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan

Tekan Angka Kemiskinan

KOTA-Pemkab Sidoarjo menyiapkan pola baru untuk memperluas perlindungan jaminan sosial sekaligus membantu menekan angka kemiskinan. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya diarahkan membawa satu pekerja rentan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Program tersebut menyasar pekerja rentan yang masuk kategori desil di bawah empat berdasarkan data yang dimiliki Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan, satu ASN akan mengikutsertakan satu pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi nanti satu PNS harus membawa satu pekerja rentan di mana saja yang masuk desil di bawah empat untuk didaftarkan menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," kata Ainun, Kamis (8/10).

Menurut dia, pekerja rentan yang menjadi sasaran program merupakan masyarakat dengan penghasilan tidak tetap dan pekerjaan yang juga tidak menentu. Selain itu, mereka bekerja pada sektor yang memiliki risiko cukup tinggi.



PEDULI: Pekerja rentan berisiko tinggi nelayan di Gisikcemandi, Sedati, Sidoarjo.

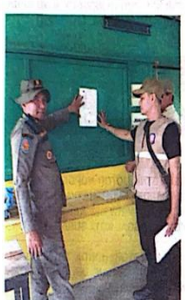
Di antaranya tukang becak, nelayan, buruh tani hingga buruh tambak. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dinilai penting agar mereka tetap mendapatkan jaminan apabila mengalami risiko dalam menjalankan pekerjaan.

"Supaya mereka yang bekerja itu tetap aman, tetap nyaman dan kalau di dalam pekerjaannya ada risiko yang dialami, mereka sudah terlindungi," jelasnya.

Untuk menentukan penerima manfaat, Pemkab Sidoarjo akan menggunakan data desil yang tersedia di Dinsos. Ainun berharap pekerja rentan yang dipilih merupakan warga yang tinggal di sekitar ASN yang bersangkutan.

Dengan begitu, keberadaan dan kondisi pekerja rentan tersebut dapat lebih mudah dipantau. Untuk tahap awal,

● Ke Halaman 10



PENERTIBAN: Satpol PP Sidoarjo SP 1 warkop di Frontage Road Gedangan, Kamis (8/10).

Giliran Bangunan Liar di Frontage Gedangan Diberi Surat Peringatan

GEDANGAN-Setelah membongkar delapan bangunan liar (bangli) di Frontage Road (FR) Sidoarjo segmen Waru, Satpol PP Sidoarjo kini menyasar kawasan Gedangan. Sebanyak 121 lapak dan bangunan liar di sepanjang FR Aloha-Gedangan mulai diberi Surat Peringatan (SP) 1, Kamis (8/10).

Mayoritas bangunan tersebut digunakan sebagai warung kopi (warkop) dan tempat usaha lainnya. Para pemilik diminta segera mengosongkan sekaligus membongkar bangunannya secara mandiri sebelum penertiban dilakukan petugas.

Penyampaian SP 1 dilakukan personel gabungan Satpol PP, TNI, Polri, serta PT KAI Daop 8 Surabaya. Sebanyak 95 personel diterjunkan untuk menyosialisasikan rencana penertiban sekaligus menyerahkan surat kepada pemilik lapak dan bangunan liar.

Kepala Satpol PP (Kasatpol PP) Kabupaten Sidoarjo Yany Setyawan mengatakan, pemberian SP 1 merupakan bagian dari tahapan penertiban yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun

● Ke Halaman 10

Penghuni Rusunawa Krian Patungan Beli Token Setiap Bulan

Agar Akses Hunian Tetap Terang

SIDOARJO – Meski berstatus aset pemerintah, dukungan terhadap operasional Rusunawa Tambak Kemerakan atau Rusunawa Krian sangat kurang. Setiap bulan, warga harus patungan membeli token listrik untuk memastikan penerangan di area rusunawa tetap menyala.

Ketua RT 11 RW 3 Rusunawa Tambak Kemerakan Misiadi mengatakan, kebutuhan token listrik untuk penerangan lingkungan mencapai Rp 750 ribu setiap bulan. Biaya tersebut dipenuhi secara gotong royong oleh penghuni. Setiap kepala keluarga (KK), setor Rp 40 ribu per bulan.

"Memang ini jadi beban. Namun, kalau tidak diisi lampu jalan mati," kata Misiadi. Dia mengatakan bahwa tidak saja penerangan yang menjadi persoalan. Sebelumnya, warga juga kesulitan mendapatkan air.

Bayar Rp 270 Ribu untuk Air Bersih

Selama lebih dari lima tahun tinggal di rusunawa, jaringan air bersih baru dipasang tiga bulan terakhir. Sebelumnya, warga harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan air bersih sekitar Rp 9 ribu per hari. "Kebutuhan air bersih bisa mencapai Rp 270 ribu per bulan. Ini untuk seluruh aktivitas termasuk mandi dan memasak," tambah Misiadi.



MINIM FASILITAS: Penghuni mengeluhkan kondisi Rusunawa Krian yang kurang layak untuk ditempati.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Supriyono mengatakan, persoalan fasilitas dasar di rusunawa perlu menjadi perhatian pengelola. Menurutnya, kebutuhan seperti air bersih, sanitasi, dan penerangan merupakan bagian penting dari kelayakan hunian. "Warga yang tinggal di rusun jangan sampai sulit mendapatkan fasilitas dasarnya," ujarnya. **(ful/hen)**

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemerintah Belum Tetapkan Pos APBN Subsidi Haji Rp 3,2 Juta

Kemenhaj Bahas Sumber Anggaran dengan Kemenkeu

JAKARTA – Pemerintah dan DPR menyepakati subsidi biaya haji 2027 sebesar Rp 3,2 juta per jemaah. Subsidi tersebut bersumber dari APBN, tetapi pemerintah belum menentukan kementerian yang akan menanggung anggarannya.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha mengatakan, besaran subsidi telah disepakati dalam rapat bersama DPR pada Rabu (7/10). Namun, pos anggaran yang digunakan masih perlu dibahas lebih lanjut. "Asalnya dari APBN. Tapi belum diputuskan APBN dari kementerian mana yang dipakai. Termasuk apakah dari Kemenhaj," jelasnya kemarin (8/10).



> Asalnya dari APBN. Tapi belum diputuskan APBN dari kementerian mana yang dipakai. Termasuk apakah dari Kemenhaj."
>
> **Ichsan Marsha**
> *Juru Bicara Kemenhaj*

Kemenhaj akan membahas sumber anggaran tersebut bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan lembaga terkait. Kepastian pos anggaran diperlukan sebelum subsidi tersebut direalisasikan dalam penyelenggaraan haji 2027.

Dengan subsidi Rp 3,2 juta per jemaah, rata-rata pelunasan biaya haji tahun depan menjadi sekitar Rp 23 juta. Nilai tersebut lebih rendah Rp 3,4 juta dibandingkan pelunasan pada 2026.

Respons MUI

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menuturkan, subsidi biaya haji selama ini berasal dari NM BPKH. Namun, pemerintah kini memberikan subsidi langsung melalui APBN.

Menurut Niam, subsidi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan istitaah atau kemampuan finansial dalam berhaji. Kemampuan finansial, kata dia, dapat berasal dari pihak lain, termasuk bantuan negara.

"Kehadiran negara dalam memfasilitasi warga banyak bentuknya. Kali ini lewat subsidi bidang keagamaan," ucapnya. **(wan/aph)**

Jawa Pos

DARURAT CURANMOR

Sepekan, Sepuluh Kendaraan Disikat Maling

SIDOARJO – Kabupaten Sidoarjo darurat pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dalam sepekan awal Oktober, sedikitnya 10 kendaraan raib digondol maling di tujuh kecamatan. Kasus terbaru terjadi Rabu (7/10). Lima sepeda motor dilaporkan raib di wilayah Kecamatan Sidoarjo dan Candi. Sementara itu, sejumlah laporan sebelumnya juga terjadi di Buduran, Gedangan, Sedati, Waru, dan Sukodono.

Selain di kecamatan tersebut, curanmor juga terjadi di Taman. NSW, 42 tahun, diamankan setelah kedapatan membawa motor yang terparkir di depan warung nasi padang. NSW datang bersama kekasihnya yang kabur.

Kasihumas Polresta Sidoarjo AKP Tri Novi Handono mengatakan, kasus curanmor dalam penanganan Satreskrim Polresta Sidoarjo. "Kami masih mendalami CCTV di sejumlah titik lainnya untuk identifikasi," katanya. **(eza/hen)**



POLSEK TAMAN

DITINGGAL KABUR KEKASIH: NSW menjalani pemeriksaan di Polsek Taman setelah tertangkap mencuri.

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Eksplorasi Alam di Alas Prambon

ALAS Prambon menjadi tempat alternatif untuk kegiatan *outbound*. Selain latihan fisik, pengunjung juga bisa mengeksplorasi keindahan alam di hutan bebas. Keberadaan wahana olahraga seperti *flying fox* juga bisa dipakai untuk menguji keberanian. (*)

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pengembang Menghilang, Fasilitas Perumahan Kurang Perawatan



Site plan dibutuhkan untuk memastikan fasilitas apa saja yang menjadi kewajiban pengembang untuk diserahkan ke pemda."

Mochamad Bachruni Aryawan
Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo

411 PSU Belum Diserahkan ke Pemkab



JOKO TRIONO/AI/JAWA POS

SIDOARJO – Jalan lingkungan, saluran air, ruang terbuka, hingga fasilitas sosial menjadi bagian penting dari kehidupan warga perumahan. Namun ketika fasilitas tersebut rusak atau membutuhkan perawatan, penanganannya tidak selalu mudah. Salah satu penyebabnya, fasilitas belum diserahkan ke pemerintah.

Tercatat ada 550 prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasilitas perumahan yang masuk data Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo. Dari angka tersebut, 411 PSU belum diserahkan ke pemkab. Penyerahan terkendala pengembang yang menghilang dan dokumen persyaratan tak lengkap.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat mengatakan, belum diserahkannya PSU membuat pengelolaan dan perawatan fasilitas di perumahan belum maksimal. Padahal, sarana itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. "Status penyerahan menjadi penting ketika fasilitas mengalami kerusakan. Pemkab akan kesulitan mengambil langkah jika PSU belum diserahkan secara resmi," kata Choirul saat hearing di DPRD Sidoarjo kemarin (8/10).

Menurut dia, persoalan semakin rumit ketika pengembang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pemerintah tidak memiliki pihak yang bisa dimintai kelengkapan administrasi untuk menyelesaikan proses penyerahan. "Masalah ini ternyata tidak hanya terjadi pada perumahan yang baru dibangun, tapi juga ada yang lama," tambah Choirul.

Dia meminta ratusan PSU tersebut segera dipetakan berdasarkan kendalanya. Perumahan yang pengembangnya masih ada didorong segera menyelesaikan proses penyerahan. Sementara untuk pengembang yang sudah tidak diketahui keberadaannya, perlu dicarikan mekanisme penyelesaian agar fasilitas tidak terus menggantung.

Tak Punya Lahan Makam

Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo Mochamad Bachruni Aryawan mengatakan, salah satu kendala penyerahan PSU adalah tidak tersedianya dokumen *site plan*. "Site plan dibutuhkan untuk memastikan fasilitas apa saja yang menjadi kewajiban pengembang untuk diserahkan ke pemda," kata Bachruni.

Selain dokumen, persoalan ketersediaan lahan makam juga menjadi kendala. Bachruni menyebut masih banyak pengembang yang belum menyediakan dua persen lahan untuk makam sebagaimana dipersyaratkan. Kondisi tersebut membuat proses penyerahan PSU belum dapat dituntaskan. **(ful/hen)**

Jawa Pos

POLSEK TAMAN

Penghuni Rusunawa Krian Patungan Beli Token Setiap Bulan

Agar Akses Hunian Tetap Terang

SIDOARJO – Meski berstatus aset pemerintah, dukungan terhadap operasional Rusunawa Tambak Kemerakan atau Rusunawa Krian sangat kurang. Setiap bulan, warga harus patungan membeli token listrik untuk memastikan penerangan di area rusunawa tetap menyala.

Ketua RT 11 RW 3 Rusunawa Tambak Kemerakan Misiadi mengatakan, kebutuhan token listrik untuk penerangan lingkungan mencapai Rp 750 ribu setiap bulan. Biaya tersebut dipenuhi secara gotong royong oleh penghuni. Setiap kepala keluarga (KK), setor Rp 40 ribu per bulan.

"Memang ini jadi beban. Namun, kalau tidak diisi lampu jalan mati," kata Misiadi. Dia mengatakan bahwa tidak saja penerangan yang menjadi persoalan. Sebelumnya, warga juga kesulitan mendapatkan air.

Bayar Rp 270 Ribu untuk Air Bersih

Selama lebih dari lima tahun tinggal di rusunawa, jaringan air bersih baru dipasang tiga bulan terakhir. Sebelumnya, warga harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan air bersih sekitar Rp 9 ribu per hari. "Kebutuhan air bersih bisa mencapai Rp 270 ribu per bulan. Ini untuk seluruh aktivitas termasuk mandi dan memasak," tambah Misiadi.



ANGGER BONDAN/JAWA POS

MINIM FASILITAS: Penghuni mengeluhkan kondisi Rusunawa Krian yang kurang layak untuk ditempati.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Supriyono mengatakan, persoalan fasilitas dasar di rusunawa perlu menjadi perhatian pengelola. Menurutnya, kebutuhan seperti air bersih, sanitasi, dan penerangan merupakan bagian penting dari kelayakan hunian. "Warga yang tinggal di rusun jangan sampai sulit mendapatkan fasilitas dasarnya," ujarnya. **(ful/hen)**

Jawa Pos

Gubernur Tinjau Servis Motor Gratis di Sidoarjo

Dorong Siswa SMK Siap Masuk Dunia Kerja

Sidoarjo, Memorandum

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memberikan layanan servis sepeda motor gratis kepada masyarakat di SMK Islam Krembung, Sidoarjo, Kamis (8/10).

Kunjungan dilakukan Khofifah untuk melihat secara langsung penerapan kompetensi yang dipelajari siswa SMK, khususnya keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM), dalam kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

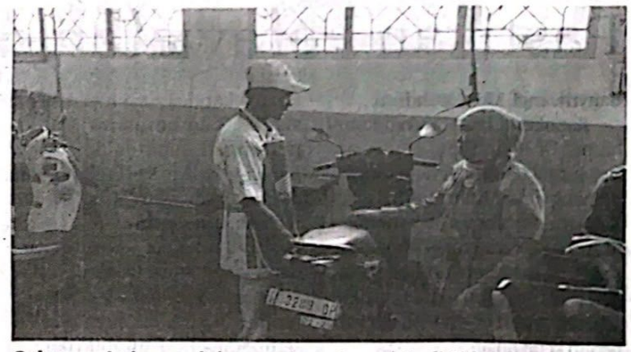
Melalui program tersebut, Khofifah juga ingin mendorong agar pendidikan vokasi di Jawa Timur tak hanya berorientasi pada pembelajaran di sekolah, tetapi memberikan ruang bagi siswa untuk mempraktikkan keterampilannya secara langsung sekaligus membangun kesiapan memasuki dunia kerja.

Program servis motor gratis ini digelar serentak di 350 SMK di Jawa Timur sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 8.100 sepeda motor milik masyarakat ditargetkan mendapatkan layanan servis gratis.

Khofifah mengapresiasi keterlibatan SMK dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan potensi dan kemampuan siswa SMK kepada masyarakat.

Selain mengasah keterampilan teknis, kegiatan pelayanan langsung tersebut memberikan pengalaman kepada siswa dalam menghadapi konsumen dan menyelesaikan persoalan kendaraan secara nyata.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap penguatan pendidikan vokasi sekaligus apresiasi terhadap kompetensi siswa SMK.



Gubernur Jatim meninjau servis motor gratis di Sidoarjo.

"Pemprov Jatim memberikan layanan servis motor gratis bagi 8.100 kendaraan milik masyarakat umum di seluruh penjuru Jatim," kata Aries.

Layanan yang diberikan meliputi servis ringan dan tune up kendaraan roda dua. Sejumlah SMK juga memberikan layanan tambahan berupa penggantian oli hingga pencucian sepeda motor gratis.

Aries menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum bagi SMK untuk menunjukkan bahwa kompetensi siswa dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

"Hal ini dapat menjadi momentum bagi SMK untuk memperkenalkan kemampuan siswa, sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan vokasi mampu memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat," ujarnya. **(bwo/jok/fdn)**

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ASN Bakal Biayai BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan

Tekan Angka Kemiskinan

KOTA-Pemkab Sidoarjo menyiapkan pola baru untuk memperluas perlindungan jaminan sosial sekaligus membantu menekan angka kemiskinan. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya diarahkan membawa satu pekerja rentan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Program tersebut menyasar pekerja rentan yang masuk kategori desil di bawah empat berdasarkan data yang dimiliki Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan, satu ASN akan mengikutsertakan satu pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi nanti satu PNS harus membawa satu pekerja rentan di mana saja yang masuk desil di bawah empat untuk didaftarkan menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," kata Ainun, Kamis (8/10).

Menurut dia, pekerja rentan yang menjadi sasaran program merupakan masyarakat dengan penghasilan tidak tetap dan pekerjaan yang juga tidak menentu. Selain itu, mereka bekerja pada sektor yang memiliki risiko cukup tinggi.



DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

PEDULI: Pekerja rentan berisiko tinggi nelayan di Gisikcemandi, Sedati, Sidoarjo.

Di antaranya tukang becak, nelayan, buruh tani hingga buruh tambak. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dinilai penting agar mereka tetap mendapatkan jaminan apabila mengalami risiko dalam menjalankan pekerjaan.

"Supaya mereka yang bekerja itu tetap aman, tetap nyaman dan kalau di dalam pekerjaannya ada risiko yang dialami, mereka sudah terlindungi," jelasnya.

Untuk menentukan penerima manfaat, Pemkab Sidoarjo akan menggunakan data desil yang tersedia di Dinsos. Ainun berharap pekerja rentan yang dipilih merupakan warga yang tinggal di sekitar ASN yang bersangkutan.

Dengan begitu, keberadaan dan kondisi pekerja rentan tersebut dapat lebih mudah dipantau. Untuk tahap awal,

● Ke Halaman 10

RADAR SIDOARJO.ID

ASN Bakal Biayai...

program tersebut direncanakan menyasar sekitar 600 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Mulai kepala dinas hingga kepala seksi, termasuk kepala kelurahan.

[illegible] sih dimatangkan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), termasuk mekanisme pembayaran iuran. "Kurang lebih 600-an pejabat struktural. Mungkin diawali dari situ, baru setelah nanti itu merambah ke semua staf," ujarnya.

Iuran kepesertaan yang harus ditanggung untuk satu pekerja rentan sebesar Rp 16.800 per bulan. Iuran tersebut untuk program jaminan ke[illegible]

Ainun menyebut Surat Edaran (SE) terkait program tersebut sebenarnya sudah berjalan. Namun, penerapannya masih menunggu petunjuk teknis, terutama mengenai mekanisme pembayaran iuran.

Pemkab masih mendiskusikan sejumlah opsi, termasuk kemungkinan iuran dibayarkan melalui pemotongan gaji ASN atau mekanisme lainnya. "Kalau [illegible] tapi kita masih perlu konsep bagaimana teknik pembayaran iurannya," katanya.

Ainun menegaskan program tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemkab Sidoarjo terhadap masyarakat kurang mampu.

Perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan juga diharapkan memiliki dampak terhadap [illegible] pekerja rentan bukan tidak mungkin berkembang. ASN yang memiliki kemampuan lebih dapat memberikan perlindungan kepada lebih dari satu pekerja rentan. "Kalau nanti kepedulian ini baru satu, mungkin nanti ada yang mengatakan saya tidak mau satu, saya ingin dua, tiga, atau empat," ujarnya.

Meski demikian, program tersebut [illegible] dilaksanakan dalam waktu dekat. Pemkab masih menyiapkan teknis pelaksanaan dan akan mengumumkan lebih lanjut setelah seluruh persiapan rampung. (dik)

Diperbanyak oleh Subbag Pemberitaan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIKY SANSURI/RADAR SIDOARJO

PELAYANAN: Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melihat langsung servis gratis sepeda motor di SMK Islam Krembung, Sidoarjo, Kamis (8/10).

Khofifah Tinjau Langsung Servis Gratis 8.100 Motor oleh Siswa SMK di Krembung

KREMBUNG-Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung keterampilan siswa SMK saat memberikan layanan servis sepeda motor gratis kepada masyarakat di SMK Islam Krembung, Sidoarjo, Kamis (8/10). Program tersebut digelar serentak di 350 titik yang tersebar di 38 kabupaten/kota dengan target 8.100 sepeda motor.

Khofifah melihat langsung para siswa jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM) menangani kendaraan masyarakat. Layanan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-81 Provinsi Jatim yang puncaknya diperingati pada 12 Oktober.

"Hari ini rangkaiannya antara lain memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten atau kota, di 350 titik, total 8.100 (motor)," kata Khofifah.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda peringatan Hari Jadi Jatim. Layanan servis gratis menjadi momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa siswa SMK memiliki keterampilan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja.

Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh SMK yang terlibat dalam program tersebut. Salah satunya SMK Islam Krembung yang ikut membuka layanan servis gratis bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan, layanan yang diberikan siswa meliputi servis ringan dan tune up. Sejumlah SMK peserta bahkan memberikan fasilitas tambahan berupa oli gratis hingga cuci motor."Jadi, kita melaksanakan servis gratis,

● Ke Halaman 10

RADAR SIDOARJO.ID

Khofifah Tinjau...

terutama servis ringan, tune up. Ada beberapa sekolah yang memberikan oli gratis, ada juga yang langsung mencuci gratis," ujarnya.

Aries menegaskan, layanan tersebut tidak khusus bagi pengemudi ojek online (ojol), melainkan terbuka untuk masyarakat umum. Informasi mengenai SMK yang membuka layanan dapat diketahui melalui QR code yang dibagikan melalui media sosial Pemprov Jatim dan Dindik Jatim. Program tersebut digelar serentak Kamis (8/10), mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB di bengkel SMK yang berpartisipasi.

Bagi Khofifah, keterlibatan siswa dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi gambaran nyata pendidikan vokasi yang tidak berhenti pada teori. Siswa mendapatkan pengalaman praktik sekaligus berhadapan langsung dengan kendaraan milik masyarakat.

Pendidikan vokasi di SMK menitikberatkan pembelajaran pada praktik dengan komposisi sekitar 70 persen praktik dan 30 persen teori. Kompetensi tersebut terus diperkuat melalui pendampingan tenaga ahli, kelas industri, praktik kerja industri (prakerin), teaching factory hingga uji kompetensi bersertifikat.

Khofifah menilai pengalaman tersebut penting untuk mempersiapkan siswa agar mampu masuk ke Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja dan Dunia Akademik (DUDIKA) setelah lulus.

"Anak-anak SMK kita dibekali pengalaman praktik dan dibimbing oleh para tenaga ahli. Karena itu, kompetensi mereka terus diasah agar mampu menangani pekerjaan secara profesional, termasuk dalam melakukan servis sepeda motor," ujarnya.

Di Jatim tercatat terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian TSM dengan total 57.094 siswa. Rinciannya, 97 SMK negeri memiliki 19.700 siswa, sedangkan 329 SMK swasta memiliki 37.394 siswa.

Khusus program servis gratis dalam rangka HUT ke-81 Jatim, sebanyak 350 SMK TSM berpartisipasi dengan melibatkan 55.035 siswa. Target layanan mencapai 8.100 sepeda motor.

Dari target tersebut, SMK negeri menargetkan servis sebanyak 2.795 unit atau 34,51 persen. Sedangkan SMK swasta menargetkan 5.305 unit atau 65,49 persen.

Para siswa juga menggandeng Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam pelaksanaan kegiatan. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan proses pembelajaran dengan kondisi kerja sebenarnya.

"Teaching factory ini mengajarkan mereka secara langsung, secara riil kerja industri. Mereka praktik langsung sesuai kurikulum dari industri. Sehingga saat lulus nanti, mereka sudah sangat siap untuk terserap DUDIKA," jelas Aries. **(dik/vga)**

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ungkap Dugaan Perdagangan Anak, Empat Perempuan Diamankan

WARU-Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Sidoarjo mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan empat perempuan di bawah umur. Mereka ditemukan di sebuah warung di kawasan Jalan Baru Medaeng, Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudhi Anugrah Putra mengatakan, pengungkapan dugaan TPPO tersebut bermula dari laporan seorang pengemudi ojek online yang melihat adanya kerumunan warga di sekitar lokasi.

"Jadi kami menerima laporan dari salah satu driver ojek online terkait adanya kerumunan warga di Jalan Baru Medaeng. Kemudian anggota kami langsung menuju lokasi," kata Yudhi.



IST

DILAPORKAN: Petugas mengamankan perempuan diduga korban tindak pidana TPPO di Medaeng, Waru.

Personel Brigade Motor (BM) Satlantas Polresta Sidoarjo

● Ke Halaman 10

RADAR SIDOARJO.ID

Ungkap Dugaan...

kemudian mendatangi lokasi. Petugas menemukan empat perempuan di bawah umur bersama seorang perempuan yang kemudian turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan awal di Polsek Waru.

Dari pemeriksaan sementara, empat perempuan tersebut diduga merupakan korban TPPO. Mereka diketahui berasal dari Pekalongan dan Pemalang, Jawa Tengah. Sebelumnya, mereka mendapat tawaran bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam di Jember. Namun, pekerjaan yang dijalani diduga tidak sesuai dengan tawaran awal. Keempatnya justru diduga dipaksa melayani pria sebagai wanita panggilan.

Polisi juga mengamankan seorang perempuan yang diduga berperan dalam mempekerjakan atau mengoordinasikan para korban. Polisi masih mendalami peran perempuan tersebut serta jaringan yang diduga terlibat dalam perkara ini.

"Dari pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Jaringan atau peristiwa ini diduga berasal dari wilayah Jember, kemudian korban dibawa melarikan diri sampai ke Sidoarjo," jelas Yudhi.

Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polsek Waru, keempat korban bersama perempuan yang diduga terlibat kemudian diserahkan kepada unit yang menangani perkara perempuan dan anak serta TPPO di Polda Jawa Timur. Penanganan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap modus, jaringan, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus TPPO tersebut.

Yudhi mengimbau masyarakat tidak ragu melaporkan kejadian mencurigakan kepada kepolisian. Laporan juga dapat disampaikan kepada petugas lalu lintas yang berada di lapangan.

"Masyarakat jangan sungkan untuk melapor kepada polisi. Bisa melalui layanan 110 atau datang langsung ke pos polisi terdekat. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti," tutupnya. (sur/vga)

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

PENERTIBAN: Satpol PP Sidoarjo SP 1 warkop di Frontage Road Gedangan, Kamis (8/10).

Giliran Bangunan Liar di Frontage Gedangan Diberi Surat Peringatan

GEDANGAN-Setelah membongkar delapan bangunan liar (bangli) di Frontage Road (FR) Sidoarjo segmen Waru, Satpol PP Sidoarjo kini menyasar kawasan Gedangan. Sebanyak 121 lapak dan bangunan liar di sepanjang FR Aloha-Gedangan mulai diberi Surat Peringatan (SP) 1, Kamis (8/10).

Mayoritas bangunan tersebut digunakan sebagai warung kopi (warkop) dan tempat usaha lainnya. Para pemilik diminta segera mengosongkan sekaligus membongkar bangunannya secara mandiri sebelum penertiban dilakukan petugas.

Penyampaian SP 1 dilakukan personel gabungan Satpol PP, TNI, Polri, serta PT KAI Daop 8 Surabaya. Sebanyak 95 personel diterjunkan untuk menyosialisasikan rencana penertiban sekaligus menyerahkan surat kepada pemilik lapak dan bangunan liar.

Kepala Satpol PP (Kasatpol PP) Kabupaten Sidoarjo Yany Setyawan mengatakan, pemberian SP 1 merupakan bagian dari tahapan penertiban yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun

● Ke Halaman 10

RADAR SIDOARJO.ID

Giliran Bangunan...

2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. "Untuk surat pemberitahuan pembongkaran mandiri ada mekanismenya. Setelah surat pemberitahuan, ada waktu tujuh hari untuk pembongkaran mandiri," ujarnya.

Setelah masa tersebut berakhir, pemilik bangunan yang masih bertahan akan mendapatkan SP 1 dengan tenggat waktu tiga hari. Jika masih belum dibongkar, petugas melanjutkan dengan SP 2 selama dua hari, kemudian SP 3 selama satu hari.

"Setelah itu ada SP satu tiga hari, kemudian SP kedua dua hari dan satu hari untuk SP ketiga," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tibumtranmas) Satpol PP Sidoarjo Raden Novianto Koesno Adi Putro menegaskan, proses penertiban diawali dengan pendekatan persuasif. Petugas diminta memberikan penjelasan secara jelas kepada para pemilik bangunan dan pedagang terkait tahapan serta ketentuan penertiban.

"Petugas agar mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif dan komunikatif," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Satpol PP mendatangi satu per satu lapak dan bangunan yang masuk dalam daftar penertiban untuk menyerahkan SP 1. Proses penyampaian surat berlangsung sejak sekitar pukul 09.55 hingga 11.25 dan berjalan aman serta kondusif.

Selain Satpol PP, pengamanan melibatkan personel Polsek Gedangan, Koramil, Kogartap 0816 Sidoarjo, Pomal Juanda, Sub Denpom V/4-1 Sidoarjo, serta PT KAI Daop 8 Surabaya.

Novianto menambahkan, pendataan bangunan masih menjadi bagian penting dalam proses penertiban. Dari pendataan yang dilakukan, terdapat bangunan yang telah memiliki sambungan listrik atau meteran. "Jumlah bangunan sekarang yang menerima surat 66. Yang pertama 93 bangunan, listrik 22. Yang ada meterannya 22 bangunan," pungkasnya. **(dik/vga)**

RADAR SIDOARJO.ID

Buntut PHK Sepihak Buruh Sidoarjo, Komisi D Ancam Laporkan Perusahaan ke

AKSARA INDONESIA.ID

HOME NASIONAL TERUPDATE PEMERINTAHAN POLITIK HUKUM PENDIDIKAN KESEHATAN INDE

3 MINUTES READING



NetShort

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat (hearing) guna memediasi dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dialami oleh Siti Fatimah, buruh PT Surabaya Perdana Rotopack yang telah mengabdi selama 30 tahun. Data Demografi

NEWS

Aturan Baru Sound Horeg di Sidoarjo

Penulis : Ariyanto | Rabu, 07 Okt 2026 20:00 WIB



Politikus Fraksi PKS-PPP DPRD Sidoarjo, Vike Widya Asroni. (Foto: Ariyanto/selalu.id).

Bagikan ke : facebook | twitter | whatsapp | Copy Link | Print

selalu.id - DPRD Kabupaten Sidoarjo mulai membawa polemik keberadaan sound horeg ke meja pembahasan regulasi.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) IV, dewan menegaskan tidak serta-merta melarang tradisi hiburan tersebut, melainkan mencari formula penertiban yang seimbang antara dampak ekonomi dan kenyamanan warga.